



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Sunan Drajat No. 10 Sumber 45611 Telp. 0231-321266
SUMBER

***IJIN PENYELENGGARAAN PROGRAM
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)***

Nomor : 421.11 / 1115.1 / Disdik

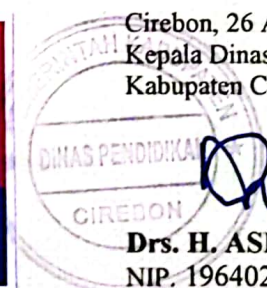
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon memberikan Ijin Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Lembaga	:	Pendidikan Anak Usia Dini Pelangi
Pengelola PAUD	:	UUM SALAMAH, S.Pd.I.
Alamat	:	Blok Pesantren RT/RW 01/01 Desa Beringin Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon
Akta	:	Pendirian Perkumpulan Pendidikan Anak Usia Dini Pelangi
Nomor Akta	:	314
Tanggal	:	26 Februari 2016
Nama PAUD	:	KB PELANGI
Jenis Program	:	Kelompok Bermain

Ijin Penyelenggaraan Program berlaku terhitung mulai tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan 25 Agustus 2023 agar digunakan sebagaimana mestinya.



Cirebon, 26 Agustus 2020
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Cirebon,



Drs. H. ASDULLAH SA, MM
NIP. 19640203 199009 1 001



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0031742.AH.01.07.TAHUN 2016**

**TENTANG
PENGEHAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
PERKUMPULAN PAUD PELANGI DESA BERINGIN**

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris ZAINUL ROCHMAN, S.H. , sesuai salinan Akta Nomor 314 Tanggal : 6 Februari 2016 yang dibuat oleh ZAINUL ROCHMAN, S.H. tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan PAUD PELANGI DESA BERINGIN tanggal 15 Maret 2016 dengan Nomor Pendaftaran 6016031532108275 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Badan Hukum Perkumpulan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan PAUD PELANGI DESA BERINGIN;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
PERKUMPULAN PAUD PELANGI DESA BERINGIN
Berkedudukan di KABUPATEN CIREBON, sesuai salinan Akta Nomor 314 Tanggal 26 Februari 2016 yang dibuat oleh Notaris ZAINUL ROCHMAN, S.H. yang berkedudukan di KABUPATEN KUNINGAN.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 15 Maret 2016.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Freddy Harris

Dr. FREDDY HARRIS, S.H., L.L.M., ACCS

DICETAK PADA TANGGAL 15 Maret 2016